



DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM



RENCANA KERJA TAHUN 2025



cipkataru.batam.go.id



media center pemko batam



pemkobatam



KATA PENGANTAR

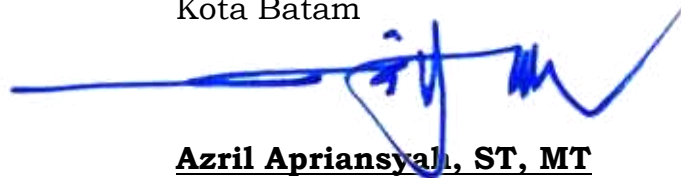
Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan berkat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam disusun sebagai bahan pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah di Kota Batam.

Penyusunan Rencana Kerja berdasarkan hasil rekapitulasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang telah dilaksanakan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional pada tahun 2024 yang belum terkomodir di Tahun 2024. Permasalahan-permasalahan yang ada tersebut ditampung, yang kemudian direkapitulasi menjadi prioritas pembangunan dan merupakan kebutuhan masyarakat.

Rencana Kerja sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2025 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, 10 Juli 2024
Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
Kota Batam



Azril Apriansyah, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730408 200212 1 005

DAFTAR ISI

COVER DEPAN i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISIiii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.1.1. PENGERTIAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2

1.1.2. PROSES PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH 4

1.1.3. KETERKAITAN ANTARA RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN
DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 6

1.2. LANDASAN HUKUM 9

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN14

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN15

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU.....17

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA.....17

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....24

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH 28

2.3.1. TINGKAT KINERJA PERANGKAT DAERAH 28

2.3.2. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN 29

2.3.3. PELUANG DAN TANTANGAN 32

2.3.4. ISU-ISU PENTING/STRATEGIS PELAYANAN PD 34

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 34

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT40

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 45

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 45

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 49

3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN..... 51

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 58

4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 58

BAB V PENUTUP104

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL/GAMBAR

Gambar 1.1.	:	Hubungan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Gambar 1.2.	:	Hubungan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Tabel 2.1.	:	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S.D Tahun 2024
Tabel 2.2.	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
Tabel 2.3.	:	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Tabel 2.4.	:	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Tabel 3.1.	:	Tujuan, Sasaran dan IKU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
Tabel 3.2.	:	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Tabel 4.1.	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur di bawah ini, sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renja
- b. penyusunan rancangan awal Renja
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah
- d. Perumusan rancangan akhir Renja

e. Penetapan Renja



Gambar 1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke-II yaitu Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang dan Misi IV yakni Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.

Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu :

- a. Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten;
- b. Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih;

- c. Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi;
- d. Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan;
- e. Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi;
- f. Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 8. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

13. Peraturan Daerah Kota Batam No. 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100).
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : (7,44/2021))
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
18. Peraturan Walikota Batam Nomor ... Tahun 2023 Tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026.
19. Peraturan Walikota Batam Nomor ... Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah menyediakan dokumen yang berisi rencana kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam antara lain:

- a. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun 2025;
- b. Sebagai bahan acuan penyusunan RKA SKPD Tahun 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun 2025, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan OPD (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD (2.3), review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional (3.1). tujuan dan sasaran Renja OPD (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun 2025 yang menjadi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Menguraikan kesimpulan-kesimpulan materi pokok dalam penjabaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun 2025.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2023 sebagaimana tabel 2.1. dengan uraian penjelasan sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dari target fisik yaitu 100 % Mencapai 100.00%;
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dari target fisik yaitu 47.40 % Mencapai 50.63%;
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dari target fisik yaitu 14.13 % Mencapai 23%;
4. Program Penataan Bangunan Gedung dari target fisik yaitu 50% Mencapai 61.63 %;
5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dari target fisik yaitu 50.34% Mencapai 50.90%;
6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dari target fisik yaitu 82.42% Mencapai 88.83%

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : **Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat daerah) tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(=7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	52.90%	52.90%
1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	56.65 %	56.65%
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang/bulan	55 orang/bulan	59 orang/bulan	59 orang/bulan	100 %	59 orang/bulan	59 orang/bulan	100%
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	0 %	0%
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	-	-	-	1 paket	0	0%
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7orang	7 Orang	12 orang	12 orang	100 %	12 orang	0	0%
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	64.47%	64.47%
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100%
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100 %	4 paket	4 paket	100%
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat daerah) tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(=7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	1 dokumen	50%
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	24 laporan	20 laporan	20 laporan	100 %	89 laporan	20 laporan	22.47%
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	72.38%	72.38%
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	3 unit	-	-	-	-	-	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	5 paket	4 paket	4 paket	100 %	53 unit	25 unit	47.17%
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 unit	35 unit	55 unit	55 unit	100 %	456 unit	150 unit	32.89%
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	52.50%	52.50%
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	4 laporan	4 laporan	100%
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	4 laporan	4 laporan	100%
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	50.00 %	50%
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	9 unit	12 unit	12 unit	100 %	15 unit	4 unit	26.67%
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	70 unit	74 unit	74 unit	100 %	86 unit	40 unit	81.63%
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	100%
1.03.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	47,40%	49.71 %	104.87 %
1.03.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100 %	1 BLUD	1 BLUD	100%
1.03.03	PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	43.49%	43.85%	45.36 %	49.71 %	109.59 %	47,40%	49.71 %	104.87 %
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam	1.100 jiwa	1.148 jiwa	1.100 jiwa	3.820 jiwa	347.27%	1.200 jiwa	0	%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat daerah) tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(=7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 %	2 dok	0	%
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	5 liter/detik	5 liter/detik	5 liter/detik	5 liter/detik	100 %	2.5 liter/detik	0	%
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	5 liter/detik	5 liter/detik	5 liter/detik	5 liter/detik	100 %	2.5 liter/detik	0	%
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	77 SR	77 SR	77 SR	77 SR	100 %	236 SR	0	%
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	24 unit	24 unit	28 unit	28 unit	100 %	32 SPAM	28 SPAM	87.50%
1.03.05	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	12.22%	12.16%	13.04 %	22.52 %	172.70%	14,13%	22.52 %	159.38 %
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK	1.095 jiwa	1.095 jiwa	500 jiwa	500 jiwa	100 %	800 jiwa	0	%
1.03.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	-	
1.03.05.2.01.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	1 lokasi	1 lokasi	-	-	-	-	-	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	219 Rumah Tangga	219 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	100 %	150 Rumah Tangga	0	%
1.03.08	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	16,67%	21,82%	33.33 %	40.76 %	122.29%	50%	49.28%	98.56%
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/ revitalisasi dan diawasi)	440 unit	576 unit	440 unit	500 unit	125%	440 unit	225 unit	51.14%
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	-	-	330 dokumen	332 dokumen	100.61%	330 unit	220 unit	66.67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat daerah) tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(=7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	436 unit	572 unit	138 dokumen	138 dokumen	100 %	100 unit	5 unit	5%
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	1 unit	1 unit	30 unit	26 unit	86.67%	5 unit	0 unit	%
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit	100 %	5 unit	0 unit	%
1.03.11	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	17,23%	17,66%	33.79 %	38.12 %	112.81%	50.34%	47.44%	94.24%
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Dibina	18,37%	28,91%	34.69 %	59,73%	172.18%	67.35%	84%	124.72 %
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	125 orang	218 orang	100 orang	189 orang	189%	100 orang	167 orang	167%
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	100 orang	100 orang	150 orang	150 orang	100 %	100 orang	100 orang	100 %
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan Data Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota Batam	1 sistem aplikasi	1 sistem aplikasi	1 Sistem Aplikasi	1 Sistem Aplikasi	100 %	1 aplikasi	1 aplikasi	100 %
1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 sistem aplikasi	1 sistem aplikasi	1 Sistem Aplikasi	1 Sistem Aplikasi	100 %	1 dokumen	1 aplikasi	%
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	7,41%	7,41%	33,33%	37.96 %	113.89%	50%	41.67 %	83.34 %
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	40 dokume n	40 dokumen	100 Dokumen	165 Dokumen	165%	100 dokumen	20 dokumen	20%
1.03.12	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	54,95%	78,24%	76,92%	87,81%	114.16%	82.42%	87.81 %	106.54 %
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan	4 dokume n	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 %	7 Dokumen	0	0%
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	4 dokume n	4 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 %	1 Dokumen	0	0%
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	-	-	1dokumen	1dokumen	100 %	6 Dokumen	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat daerah) tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(=7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah peserta sosialisasi publik dalam penataan ruang	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan dokumen hasil monev wilayah perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	0	0%
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	0	0%
1.03.12.2.03.01	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi penataan ruang yang dibangun dan dikembangkan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	45 dokumen	128 dokumen	34 dokumen	143 dokumen	420.59%	8 Dokumen	327 dokumen	4087.50%
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan	45 dokumen	128 dokumen	34 dokumen	143 dokumen	420.59%	8 Dokumen	327 dokumen	4087.50 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam menjalankan urusan wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan misi ke 2 dan 4 Walikota Batam yaitu Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang dan Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam, dengan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten;
2. Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih;
3. Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi;
4. Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan;
5. Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi;
6. Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor penentu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Oleh karena itu pelaksanaan misi kedua tersebut menjadi salah satu bentuk pelayanan prima yang diberikan oleh Dinas Cipta Karya dan tata Ruang Kota Batam. Pembangunan di bidang Keciptakarya ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung masyarakat dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhannya serta memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas keindahan kota. Pembangunan di bidang keciptakarya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan dan gedung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat dan peningkatan pelayanan air minum.

Selain itu, pembangunan di bidang keciptakaryaan juga melakukan pembinaan jasa konstruksi.

Dari tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 6 sasaran, semuanya mencapai target. Kinerja sasaran yang memenuhi target ini di dukung oleh komponen/indikator sebagai berikut :

1. Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten/Persentase kesesuaian Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang.

Ruang lingkup pelaksanaan kesesuaian perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang adalah meliputi pengaturan mengenai kegiatan perencanaan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan yang digunakan. Saat ini Kota Batam telah menyelesaikan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 119). Kota Batam telah memiliki 4 Perwako tentang WP RDTR diantaranya :

- a. Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, Dan Batu Aji Kota Batam Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 847).
- b. Peraturan Walikota Batam Nomor 249 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2022-2042.
- c. Peraturan Walikota Batam Nomor 250 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2022-2042.
- d. Peraturan Walikota Batam Nomor 251 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sagulung Kota Batam Tahun 2022-2042.

Dengan telah tersedianya 10 wilayah perencanaan perlu pengendalian, kesesuaian dalam pemanfaatan, pengawasan dan evaluasi tata ruang Kota Batam yang lebih optimal sehingga

perencanaan tata ruang tersebut tidak sia-sia. Tingginya investasi yang masuk di Kota Batam baik untuk kegiatan industri maupun perumahan menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah di perlukan aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif. Produk tata ruang yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RTDR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/ kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yang meliputi : Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Tata Bangunan, Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, Ketentuan Pelaksanaan, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Standar Teknis, Ketentuan Peraturan Zonasi. Solusi yang dilakukan untuk melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang adalah dengan tim verifikasi izin pemanfaatan ruang sehingga ada memonitor atau pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

2. Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga/
Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan.

Pengukuran dilaksanakan atas Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis, Pembangunan, Peningkatan, Perluasan dan Operasional/Pemeliharaan SPAM di Wilayah Hinterland dengan jumlah SR akhir tahun 2022 berjumlah 7.352 SR atau sekitar 29.408 jiwa. Penambahan SR dilakukan dengan pembangunan SPAM baru di beberapa lokasi dan penambahan jaringan SR serta penyambungan SR Mandiri di Kegiatan BLUD. Untuk mencapai target yang telah disepakati di dalam RPJMD Tahun 2021 s.d 2026 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam di tahun 2022 telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan dan 6 sub kegiatan guna meningkatkan pelayanan air bersih yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebanyak 1 paket kegiatan (DAK Regu) serta

kegiatan yang bersumber dari APBD Kota (termasuk 1 kegiatan yang pengelolaan dana operasionalnya bersumber dari Pendapatan BLUD Penyediaan Air Bersih yang perencanaan keuangannya melalui Rencana Bisnis Anggaran /RBA).

3. Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi/Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga.

Selain melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan infrastruktur penyediaan air bersih di Hinterland, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam juga melaksanakan kegiatan infrastruktur untuk menunjang penyediaan sanitasi yang layak. Pengukuran sanitasi dilakukan dengan penyediaan system penanganan limbah secara komunal atas pemasangan jaringan sanitasi (SR/Sambungan Rumah) di wilayah Hinterland dan kelurahan di mainland yang merupakan lokasi pesisir pantai dengan jumlah SR akhir tahun 2022 berjumlah 1.899 atau sekitar 9.495 jiwa. Penambahan SR dilakukan dengan pembangunan baru Tangki Septitank Skala Komunal di beberapa lokasi.

4. Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan/ Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan.

Pengukuran terhadap sarana prasarana gedung pemerintah dan masyarakat umum dilaksanakan terhadap gedung kantor, fasilitas umum, 139 unit. Kondisi gedung pemerintah dan fasilitas umum yang kurang representatif yang dimaksud adalah kondisi gedung yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan layanan dan perkembangan tingkat kebutuhan saat ini dari tupoksi masing-masing instansi tersebut. Dengan kondisi tersebut di atas dipandang perlu untuk dilakukan peningkatan kualitas agar lebih memberikan kenyamanan pelayanan sekaligus beautifikasi secara fisik dan dapat menampilkan performance sarana prasarana gedung yang lebih representatif.

Selain jumlah unit bangunan baru yang dibangun, Jumlah unit bangunan yang direhabilitasi/direnovasi/direvitalisasi dan Jumlah unit bangunan yang dipelihara/dirawat juga dilakukan Pengawasan bangunan gedung/menara yang dilaksanakan oleh UPT Pengawasan bangunan gedung dan menara. Pengawasan ini

menerapkan sanksi Perda tahap pertama yakni memberikan peringatan tertulis yakni berupa surat pemberitahuan, bahwa terdapat pelanggaran fungsi/persyaratan/ penyelenggaraan bangunan gedung dan menara dilapangan yang dilakukan oleh oknum masyarakat.

5. Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi/Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi.

Pengukuran terhadap keberhasilan adalah pelaksanaan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi. Dengan kondisi tersebut di atas dipandang perlu untuk dilakukan peningkatan kualitas agar lebih memberikan kenyamanan pelayanan pelaksanaan tenaga terampil konstruksi, penyediaan informasi serta pengawasan dan pemanfaatan jasa konstruksi. Yang sudah dilaksanakan adalah Sertifikasi tenaga terampil konstruksi sebanyak 189 orang, Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi sebanyak 150 orang, Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha sebanyak 1 aplikasi dan Pengawasan pelaksanaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi sebanyak 165 dokumen

6. Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Keuangan, Administrasi Penunjang, Kepegawaian, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas.

Pelaksanaan rutinitas yang dilaksanakan guna terlaksananya pelaksanaan pengadministrasian keuangan, kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang, penyediaan jasa, pemeliharaan barang serta pelaksanaan pelayanan BLUD UPT Pelayanan Air Bersih

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

No	Indikator		SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
	Tujuan	Sasaran			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota Batam berserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten			-	54,95%	76.94	82.42	87.91	-	78,24%	87.81	88.83 %	82.42	87.91	
2	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	Rumah tangga yang menggunakan air bersih		-	43,49%	45.36	47.40	49.61	-	43,85%	49.71	50.63	49.71	51.46	
3		Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga	Rumah tangga ber-sanitasi		-	12,22%	13.04	14.13	15.28	-	12,16%	22.52	23	22.52	15.28	
4	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Persentase Pemenuhan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan			-	16,67%	33.33	50.00	66.67	-	21,82%	40.76	61.63	50.00	66.67	
5		Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi			-	17,23%	33.79	50.34	66.89	-	17,66%	38.12	50.90	50.34	66.89	
6		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 2.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 202 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang	82,42 %	88,83 %	107.78%
2	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Keuangan, Administrasi Penunjang, Kepegawaian, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas	100 %	100 %	100.00%
3	Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Persentase Pemenuhan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan	50 %	61.63 %	123.26%
4	Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	50.34 %	50.90 %	101.11%
5	Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	47.40 %	50.63 %	106.81
6	Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi	Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga	14.13 %	23 %	162.77%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. TINGKAT KINERJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Batam. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mengacu pada tugas dan fungsi organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, maka tugas pokok Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah :

2. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi
3. Tugas pembantuan di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang
4. Serta tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sedangkan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi.
3. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi.
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tidak terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, pencapaian Visi dan Misi Kota Batam menjadi salah satu fokus dan tujuan utama yang harus dipenuhi. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD, masuk dalam misi II (Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.) dan Misi IV Melanjutkan Percepatan pembangunan di

Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.

2.3.2. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Perumusan strategi pembangunan, perencanaan, pengendalian pemanfaatan ruang, sarana pelayanan dasar dan infrastruktur perkotaan merupakan hasil telaah terhadap penetapan strategi pembangunan yang telah disusun sebelumnya dan kondisi permasalahan yang menginduksi perumusan visi dan penetapan misi serta sasaran yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Batam.

Ketersediaan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland, terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten, dan tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu merupakan suatu kebutuhan dasar publik saat ini. Ketimpangan pelayanan penyediaan air bersih/sanitasi antara daerah mainland hinterland harus segera diatasi demi keadilan dan pemerataan serta menghindari kecemburuan sosial sangat berdampak pada kualitas hidup sehat dan penurunan stunting Kota Batam.

Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam selaku pengampu urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mana Kota Batam memiliki keunikan karena berbatasan langsung dengan negara luar seperti Singapura dan Malaysia. Kota Batam sendiri merupakan daerah strategis nasional yang merupakan objek industri vital nasional sehingga pertumbuhan penduduk juga sangat tinggi setiap tahunnya. Dalam rangka menunjang Kota Batam Menuju Bandar Dunia Madai Yang Modern dan Sejahtera tentunya bukan suatu hal yang mudah, apalagi Kota Batam merupakan garda terdepan dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kepulauan Riau karena bersaing dengan negara tetangga agar iklim investasi dan ekonomi Batam semakin maju dan bergerak pesat.

Seiring dengan tumbuh kembangnya dunia industri Kota Batam maka kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan juga akan semakin tinggi sedangkan ketersediaan lahan untuk infrastruktur perkotaan sangat minim. Lajunya pertumbuhan

penduduk dan berkembangnya dunia usaha baik industri galangan maupun pariwisata memberikan dampak positif dari segi pendapatan daerah akan tetapi juga akan berbanding lurus dengan timbulnya kesenjangan sosial dalam penyediaan kebutuhan dasar hajat hidup orang banyak. Semakin maju suatu daerah maka akan semakin besar tantangan yang harus dihadapi, karena bukan hanya permasalahan infrastruktur tetapi, akses air bersih, sanitasi yang menjadi tolak ukur keseimbangan pembangunan suatu daerah yang berwawasan lingkungan, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib harus dipenuhi sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

Sebagai upaya perwujudan tersebut, perlu langkah kongkrit dan tersistem dalam menggali potensi yang ada guna menunjang keberhasilan. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap beberapa faktor pendukung seperti potensi kekuatan (*Strenght*) dan peluang-peluang (*Opportunity*) apa saja yang dapat dimanfaatkan sehingga mampu menopang tugas pokok dan fungsi organisasi. Selain analisis terhadap penunjang keberhasilan, maka perlu dilakukan juga analisis terhadap kelemahan (*Weakness*) agar dapat menciptakan peluang dan tidak melupakan analisis terhadap ancaman (*Threat*) yang akan terjadi sehingga ancaman yang dipetakan tidak memberi dampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sehingga strategi yang akan diambil menjadi efektif dan efisien sehingga apa yang menjadi tujuan perangkat daerah dapat terwujud diantaranya :

1. Analisis Kekuatan (*Strengths*)

- a. Struktur organisasi yang mendukung
- a. Kualitas sumber daya manusia yang memadai diklat teknis

2. Analisis Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Dukungan sarana dan prasarana
- b. Minimnya jumlah sumber daya manusia
- c. Belum adanya basis data terpadu yang akurat
- d. Keterbatasan sumber dana

3. Analisis Peluang (*Opportunity*)

- a. Letak Kota Batam sebagai kawasan strategis nasional yang memicu invenstasi

- a. Adanya Otonomi daerah yang memungkinkan Kewenangan yang luas bagi Daerah dalam melaksanakan pembangunan
- b. Pemenuhan infrstruktur dasar dan adanya kepentingan dari Pemerintah pusat di Kota Batam sehingga dana pusat dapat terserap di Batam

4. Analisis Ancaman (Threat)

- a. Keterbatasan lahan diperkotaan
- b. Belum adanya komitmen dalam penataan ruang
- c. Belum adanya kerjasama dengan sektor swasta dalam penyediaan fasum perumahan bagi masyarakat.

Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

No	Aspek	Permasalahan/Hambatan
1	Permasalahan Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan, Pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang dan penegakan disiplin	1. Belum tersedianya dokumen pengendalian tata ruang 2. Terbatasnya informasi secara digital 3. Kurangnya data dan fasilitasi untuk melakukan survey terhadap penataan dan pemanfaatan ruang 4. Belum adanya aturan lanjutan tingkat daerah sesuai yang diamanatkan dalam PP 21, Perda RTRW dan RDTR mengenai sanksi dan insentif. 5. Pengawasan dan audit belum maksimal 6. Kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan penataan ruang sangat rendah 7. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait
2	Permasalahan penataan dan kelayakan bangunan dan gedung serta penataan bangunan dan lingkungan	1. Masih kurangnya keselarasan dan konsistensi perencanaan Pembangunan daerah 2. Tingginya kebutuhan pembiayaan penanganan dibidang infrastuktur 3. Dinas CKTR masih sebatas mengeluarkan Peraturan Teknis bukan sebagai regulator PBG 4. Pengawasan dilapangan masih rendah 5. Penegakan Perda Bangunan Gedung masih belum terlaksana
3	Permasalahan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil jasa konstruksi, sistem Informasi dan Pengawasan	a. Kurangnya fasilitasi untuk pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga terampil jasa konstruksi 2. Peran pihak swasta untuk memfasilitasi sertifikasi yang mempekerjakan tenaga terampil belum maksimal 3. Kurangnya Informasi Jasa Konstruksi untuk pelaku usaha dan masyarakat Kota Batam secara digital 4. Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaku penyelenggaraan, usaha dan pemanfaatan jasa konstruksi
4	Permasalahan pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Rasio rumah tangga hinterland yang terlayani air bersih akhir tahun 2022 mencapai 49.71 % 2. Faktor geografis kepulauan dan jenis struktur tanah berimplikasi pada sulitnya ketersediaan air tanah 3. Faktor iklim yang berdampak pada kekeringan 4. Masih kurangnya sumber-sumber penampung air bersih beserta jaringan pipa distribusi air.

No	Aspek	Permasalahan/Hambatan
		5. Penyediaan Dana untuk infrastruktur di Hinterland sangat tinggi
5	Permasalahan pengembangan Sistem Air Limbah/ Sanitasi	1. Rasio rumah tangga Hinterland yang dibangun menggunakan SPALDS yang layak sangat rendah dimana sampai akhir tahun 2023 mencapai 23 % yang terlayani SPALDS dari jumlah penduduk hinterland 2. Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat masih rendah terutama yang bermukim di atas garis pantai/laut 3. Ketersediaan data pengguna sanitasi mandiri/ didarat belum tersedia 4. Sebagian Masyarakat pesisir masih memilih sanitasi konvensional dan menolak untuk menggunakan infrastruktur komunal dan lebih sehat

2.3.3. PELUANG DAN TANTANGAN

Optimalisasi pembangunan tentu saja terus diupayakan agar pemenuhan infrastruktur dasar tetap terpenuhi secara maksimal. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar tentunya mempengaruhi tingkat sosial dan kultur masyarakat. Dalam rangka pemenuhan tersebut tentu saja banyak hal yang masih menjadi kendala sehingga pelaksanaan program kegiatan menjadi tidak optimal. Secara umum tantangan dan peluang yang juga menjadi pokok permasalahan dalam penyelenggaraan urusan yang diampu dan dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam selama 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan pemetaan.

A. Peluang

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perencanaan serta pemanfaatan/pengelolaan data informasi tata ruang.
- 2) Meningkatnya pelaksanaan penataan dan pemanfaatan ruang.
- 3) Meningkatkan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.
- 4) Meningkatnya penataan dan kelayakan bangunan dan gedung serta penataan bangunan dan lingkungan.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil jasa konstruksi.
- 6) Meningkatnya sistem informasi jasa konstruksi.
- 7) Meningkatnya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- 8) Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.

- 9) Meningkatnya pengembangan Sistem Air Limbah/ Sanitasi

B. Tantangan

- 1) Belum tersedianya peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.
- 2) Penataan dan pemanfaatan Ruang belum optimal terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor dan antar pelaku.
- 3) Belum adanya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan/gender) dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- 4) Terbatasnya sumber air baku untuk mendukung penyediaan air minum dan menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan.
- 5) Belum optimalnya peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pengembangan penyediaan air minum dalam pengolahan penyediaan air minum.
- 6) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
- 7) Masih terbatasnya akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing Kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
- 8) Penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global masih rendah.
- 9) Masih terbatasnya setiap pekerja terampil jasa konstruksi memiliki sertifikasi keahlian.
- 10) Akses informasi jasa konstruksi untuk pelaku usaha dan masyarakat Kota Batam masih belum tersedia.

- 11) Belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.

2.3.4. ISU-ISU PENTING/STRATEGIS PELAYANAN PD

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021-2026, isu-isu penting/strtegis yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi adalah meliputi :

1. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana dan sarana bangunan baik bangunan pemerintah maupun fasilitas untuk masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan tata ruang antara penyelenggaraan tata ruang nasional, provinsi dan kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang.
3. Menyelaraskan pembangunan prasarana air bersih dan sanitasi wilayah hinterland.
4. Praktek penyelenggaraan ke Cipta Karya-an ke depan tidak lagi diwarnai oleh sistem yang birokratis, kurang fleksibel, dengan kapasitas inovasi dan kretativitas yang masih terbatas.
5. Kegiatan pengelolaan infrastruktur masih terkonsentrasi pada aspek pembangunan belum memperhatikan aspek pemanfaatan dan pengembangan asset.
6. Kualitas SDM di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang saat ini masih kurang memadai.

Keenam isu penting tersebut menjadi fokus penanganan dan menjadi dasar perencanaan dalam penentuan/penetapan program kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, tidak terkecuali pada perencanaan program kegiatan Tahun 2025.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan Rancangan Awal dan prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Pemerintah Kota Batam Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa terdapat 6 (enam) sasaran yang ingin dicapai meliputi :

- a. Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten;
- b. Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih;
- c. Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi;
- d. Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan;
- e. Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi;
- f. Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu terdapat 6 Program yang mendukung sasaran diatas menjadi tanggungjawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan target/indikator yang harus dicapai yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang sebesar 93.41 %)
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Persentase penduduk yang terlayani air bersih sebesar 51.99 %)
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (Persentase penduduk yang terlayani sanitasi sebesar 16.50 %)
4. Program Penataan Bangunan Gedung (Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola sebesar 83.33 %)
5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi (Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi sebesar 83.45 %)
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan sebesar 100%)

**Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : **Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				280.774	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				273.164	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				280.774	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				273.164	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	21.933.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	34.954	
1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	12.411	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	24.453	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 orang/bulan	12.107	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang/bulan	24.453	
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	304	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	0	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	367	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	349	
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	88	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	0	
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	279	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	349	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	875	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.307	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	16	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	157	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	388	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	70	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	42	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	221	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	118	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	410	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	743	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	1.191	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	1.988	
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan kendaraan dinas	Kota Batam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	Pengadaan kendaraan dinas	Kota Batam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 unit	971	
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	114	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	161	
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	1.077	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	856	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.000)	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	1.321	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	692	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	492	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	541	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	829	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	151	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 %	782	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 %	960	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	42	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	518	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	611	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	60	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	68	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	204	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	239	
1.03.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100 %	4.980	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100 %	5.205	
1.03.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.980	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5.205	
1.03.03	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase penduduk yang terlayani air bersih	51.99%	62.178	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase penduduk yang terlayani air bersih	51.99%	93.730	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam	1.400 jiwa	62.178	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam	1.400 jiwa	93.730	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kota Batam	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 dokumen	999	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kota Batam	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 dokumen	666	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Batam	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 Liter/Detik	16.443	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Batam	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 Liter/Detik	22.150	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Batam	Peningkatan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2.5 Liter/Detik	21.812	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Batam	Peningkatan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2.5 Liter/Detik	39.407	
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kota Batam	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	34 unit	21.570	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kota Batam	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	34 unit	25.864	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Batam	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150 SR	1.354	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Batam	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150 SR	5.643	
1.03.05	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	16.50 %	4.606	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	16.50 %	6.075	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/ MCK	950 jiwa	4.606	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/ MCK	950 jiwa	6.075	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kota Batam	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota			Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kota Batam	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota			
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Dosmestik (SPALD) Setempat	Kota Batam	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	160 Rumah Tangga	4.606	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Dosmestik (SPALD) Setempat	Kota Batam	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	160 Rumah Tangga	6.075	
1.03.08	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	83.33 %	179.367	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	83.33 %	129.677	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/revitalisasi dan diawasi)	440 unit	179.367	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/revitalisasi dan diawasi)	440 unit	129.677	
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	8 unit	107.771	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	8 unit	53.122	
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 unit	8.228	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 unit	8.399	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100 dokumen	62.250	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100 dokumen	66.515	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Batam	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	330 dokumen	1.116	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Batam	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	330 dokumen	1.641	
1.03.11	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	83.45%	919	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	83.45%	807	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Persentase Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Dibina	83.67%	462	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Persentase Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Dibina	83.67%	807	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kota Batam	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	100 orang	286	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kota Batam	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	100 orang	505	
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kota Batam	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100 lembaga	176	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kota Batam	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100 orang	302	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ketersediaan Data Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota Batam	1 dokumen	334	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ketersediaan Data Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota Batam	1 dokumen	0	
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 dokumen	334	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 dokumen	0	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	83.33%	122	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	83.33%	0	
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kota Batam	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	100 paket pekerjaan	96	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan,	Kota Batam	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang	100 paket	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	pekerjaan		
1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	20 Bangunan Konstruksi	26	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	20 Bangunan Konstruksi	0	
1.03.12	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	93.41%	11.777	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	93.41%	7.904	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan	6 dokumen	9.478	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan	6 dokumen	6.067	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Batam	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	4 dokumen	2.100	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	4 dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	6 dokumen	2.718	
1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	2 dokumen	7.378	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	2 dokumen	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	2 dokumen	3.349	
1.03.12.2.02	Kordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik	100 dokumen		Kordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik	100 dokumen	250	
1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kota Batam	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	100 dokumen		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	100 dokumen	250	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ketersediaan dokumen hasil movev wilayah perencanaan	1 dokumen	1.418	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ketersediaan dokumen hasil movev wilayah perencanaan	1 dokumen	943	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kota Batam	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 dokumen	1.354	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kota Batam	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 dokumen	845	
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kota Batam	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 dokumen	64	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kota Batam	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 dokumen	98	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	12 dokumen	881	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	12 dokumen	644	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Batam	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	10 Dokumen	577	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	10 Dokumen	267	
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kota Batam	Jumlah Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	91	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	1 Dokumen	Jumlah Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	61	
1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Kota Batam	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Dokumen	213	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Dokumen	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	10 Dokumen	316	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja PD selain berasal dari rencana kerja pemerintah daerah, juga mempertimbangkan usulan dari berbagai pemangku kepentingan. Usulan masyarakat disampaikan melalui musrenbang secara bertingkat dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota. Sementara usulan DPRD Kota Batam berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses DPRD Kota Batam yang telah diparipurnakan dan disampaikan baik secara tertulis maupun terinput dalam SIPD RI.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam berperan sebagai koordinator penunjang urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Telaahan usulan dari berbagai kepentingan yang masuk pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Vol ume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.03.03. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani air bersih			
	1.03.03.2.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam			
	1.03.03.2.01.0028. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun			
	pembangunan SPAM Pulau Panjang Kel. Sijantung Kec.Galang	Kel. Sijantung Kec.Galang		1 lokasi	
	Pembangunan SPAM Kel. Sijantung Kec. Galang	Kel. Sijantung Kec. Galang		1 lokasi	
	Pembangunan SPAM Tehuk Nipah Kel. Galang Baru Kec. Galang	Kel. Galang Baru Kec. Galang		1 lokasi	
	Pembangunan SPAM Batu Putih Pulau Karas Kec. Galang	Pulau Karas Kec. Galang		1 lokasi	
	Lanjutan Pembangunan SWRO Belakang Padang	SWRO Belakang Padang		1 lokasi	
	1.03.03.2.01.05. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu			
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Kasu	WTP Kasu		1 lokasi	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Setokok	WTP Setokok		1 lokasi	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Mecan	WTP Mecan		1 lokasi	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pemping	WTP Pemping		1 lokasi	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Ngenang	WTP Ngenang		1 lokasi	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pecung	WTP Pecung		1 lokasi	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Jaloh	WTP Jaloh		1 lokasi	
	Optimalisasi/Peningkatan WTP Terong	WTP Terong		1 lokasi	
	Pemeliharaan SWRO Pulau Labu	Pulau Labu		1 lokasi	
	1.03.08. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola			
	1.03.08.2.01. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/revitalisasi dan diawasi)			
	1.03.08.2.01.0021. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
	Pembangunan Gedung Kantor Bawaslu Kota Batam	Kota Batam		1 unit	
	Pembangunan Gedung Kantor Bersama 2	Kota Batam		1 unit	
	Pembangunan Gedung Kantor KPU	Kota Batam		1 unit	
	Pembangunan Gedung Kantor Lurah Sagulung Kota Kec. Sagulung	Sagulung		190 M2	
	Pembangunan Gedung Kantor Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja	Lubuk Baja		190 M2	
	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perpustakaan Kota Batam	Kota Batam		100 M2	
	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	Sekupang		100 M2	
	Pembangunan Gedung City Hall (Gedung Balai Kota) Kota Batam	Kota Batam		200 M2	
	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	Sekupang		149 M2	
	Pembangunan Gedung Kantor Lurah Sungai Harapan	Sekupang		190 M2	
	Lanjutan Pembangunan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Kota Batam	Batuaji		1.000 M2	
	Pembangunan sarana dan Prasarana Penguatan Ekonomi kreatif Mesjid Sultan	Batuaji		300 M2	
	Pembangunan Gedung Aula Kanor Lurah Tiban Baru	Kelurahan Tiban Baru		39 M2	
	Pembangunan Gedung Aula Kecamatan Sekupang	Kecamatan Sekupang		39 M2	
	Pembangunan Gedung Aula Kantor Lurah Duriangkang Kel. Duriangkang Kec. Sungai Beduk	Kantor Lurah Duriangkang Kel. Duriangkang Kec. Sungai Beduk		50 M2	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembangunan Gedung Aula Kelurahan Pulau Buluh Kecamatan Bulang Kota Batam	Kelurahan Pulau Buluh Kecamatan Bulang Kota Batam		50 M2	
	Pembangunan Pagar Masjid Agung Batam Center	Batam Center			
	Lanjutan Pembangunan Pagar Dataran Engku Putri Batam Centre	Kota Batam		900 M2	
	Pembangunan Pagar Kantor Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang	Kec. Bulang		54 M2	
	Pembangunan Pagar RSUD Kota Batam	Kec. Batuaji		206 M2	
	Penataan Dataran Engku Putri Batam Centre	Kota Batam		500 M2	
	Pembangunan Landscape Masjid Sultan	Batuaji			
	1.03.08.2.01.0017. Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan			
	Revitalisasi/Rehab Kantor Dinas Perikanan Kota Batam	Kota Batam		50 M2	
	Revitalisasi Lanjutan Masjid Agung Batam Centre	Kota Batam		12.046 M2	
	Revitalisasi Masjid Raya Baiturrahman Kec. Sekupang	Kec. Sekupang		750 M2	
	Revitalisasi Kantor Lurah Batu Besar	Batu Besar		40 M2	
	Revitalisasi Kantor Lurah Belian	Kelurahan Beian		38 M2	
	Revitalisasi Kantor Lurah Tiban Lama	Kelurahan Tiban Lama		80 M2	
	Revitalisasi Kantor Lurah Tanjung Buntung	Kelurahan Tanjung Buntung		80 M2	
	Lanjutan Revitalisasi Kantor Lurah Tanjung Sengkuang	Kelurahan Tanjung Sengkuang		50 M2	
	Revitalisasi Pagar Mesjid Agung Batam Center	Batam Center			
	Penataan Landscape Masjid Agung Batam Center	Batam Center			

BAB III
TUJUAN DAN SARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2025 berada pada tahap jangka menengah yang kelima yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

- Visi : "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yangg Anda Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden da Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, da Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
- Misi :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung

penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sasaran Strategis :

- Sasaran : 1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air
2. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya
- Arah Kebijakan dan Strategi : Arah kebijakan dan strategi akan dilaksanakan melalui 5 program dan 50 kegiatan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 ditetapkan Visi dan misi yakni :

- Visi : Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
- Misi : 1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan.
2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.
- Tujuan : Penataan Ruang yang adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan
- Sasaran : Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang
- Kebijakan : 1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersedian Rencana Tata Ruang yang tertib dan terkendali.
2. Pengendalian pemanfaatan ruang termasuk alih fungsi lahan agar tercapai tertib ruang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mengacu kepada Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau

Visi	: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Merata serta Meningkatkan Keterhubungan Kabupaten/Kota
Misi	: 1. Meningkatkan Ketersediaan Prasarana dan Sarana Dasar Masyarakat agar dapat hidup secara layak. 2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Hijau yang berketahanan Iklim dan Adaptif terhadap Bencana melalui pengembangan dan menerapkan Konsep Kota Hijau dan Green Transportation, Green Waste (Pengelolaan Sampah dan Limbah melalui 3R), green water (Efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan) dan green energy (Pemanfaatan sumber energy yang efisien dan ramah lingkungan). 3. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Cipta Karya yang meliputi sumber daya manusia, perencanaan, pengendalian dan pengawasan, ketersediaan serta Pengembangan untuk mendukung pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (good governance).
Tujuan	: 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar 2. Menyelenggarakan pembangunan bidang perumahan dan permukiman untuk mendukung kota hijau
Sasaran	: Meningkatkan kapasitas dan fungsi sanitasi serta air bersih/air minum Peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan perkotaan Penyediaan PSD untuk penataan lingkungan dan kawasan perkotaan
Strategi dan arah kebijakan	: Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana yang lain yaitu: jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan penyehatan lingkungan permukiman

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau

Visi	: “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”
Misi	: 1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat. 2. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir.
Tujuan	: Perwujudan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
Sasaran	: Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Strategi	1. Meningkatkan peningkatan, pembinaan dan pengawasan bidang penataan ruang 2. Memperkuat regulasi terkait penataan ruang 3. Menyebarkan luaskan informasi terkait penataan ruang

- Kebijakan : 1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
2. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
4. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
5. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
6. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota

No	Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra Dinas CKTR	Sasaran pada Renstra Dinas Provinsi	Sasaran pada Renstra Kementerian
1	Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota Batam berserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau : 1. Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional : 1. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang
2	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi : 1. Meningkatkan kapasitas dan fungsi sanitasi serta air bersih/air minum Peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan perkotaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) : 1. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau 2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
3	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi	Penyediaan PSD untuk penataan lingkungan dan kawasan perkotaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) : 1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021-2026. Adapun tujuan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah :

1. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten;
2. Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni;

3. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan Sanitasi di Wilayah Hinterland.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten.
2. Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.
3. Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi.
4. Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih.
5. Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi
6. Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja PD Tahun 2025 mengacu pada Renstra PD Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam tabel.

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2025
1	Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase kesesuaian Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang	93,41%
2	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Keuangan, Administrasi Penunjang, Kepegawaian, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas	100%
3	Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Persentase Pemenuhan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan	83,33%
4	Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	83,45%
5	Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	51,99%
6	Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi	Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga	16,50%

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2025 mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026 yang dirinci dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam 2021-2026. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mencukung pencapaian Misi II : Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang dan Misi IV : Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam. Dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan target capaian 100 %
 - a. Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan target capaian 100 %;
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan target capaian 100 %;
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan target capaian 100 %;
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penuh
 - e. njang Urusan Pemerintah Daerah, dengan target capaian 100 %;
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target capaian 100 %;
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target capaian 100 %;
 - h. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan target capaian 100 %.
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan target capaian 51.99 %
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 12 dokumen, dengan target capaian 1.400 jiwa
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan target capaian 16.50 %

- a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan target capaian 900 jiwa.
- 4. Program Penataan Bangunan Gedung, dengan target capaian 83.33 %
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dengan target capaian 440 unit
- 5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan target capaian 83.45 %
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dengan target capaian 83.67 %;
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan target capaian 1 dokumen;
 - c. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, dengan target capaian 83.33 %.
- 6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan target capaian 93.41 %
 - a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota, dengan target capaian 6 dokumen;
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan target capaian 1 dokumen;
 - c. Kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan target capaian 1 dokumen;
 - d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan target capaian 12 dokumen.

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : **Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam**

Kode	Urusan/Bid.Urusan Pemda dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				273.164.019.754				313.802.196.811
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				273.164.019.754				313.802.196.811
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	34.960.808.928			100 %	37.759.579.549
1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	24.453.507.178			100 %	25.676.182.537
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	55 Orang/bulan	24.453.507.178	APBD II		55 Orang/bulan	25.676.182.537
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	349.420.000			100 %	401.833.000
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Batam	1 Paket	0	APBD II		1 Paket	0
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam	10 Orang	349.420.000	APBD II		10 Orang	401.833.000
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1.309.035.000			100 %	1.505.390.250
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 paket	16.128.000	APBD II		1 paket	18.547.200
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	5 Paket	388.582.000	APBD II		5 Paket	446.869.300
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	42.375.000	APBD II		2 Paket	48.731.250
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Batam	12 Dokumen	118.000.000	APBD II		12 Dokumen	135.700.000
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	70 Laporan	743.950.000	APBD II		70 Laporan	855.542.500
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100 %	1.988.952.000			100 %	2.287.294.800
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Batam	7 unit	971.812.000	APBD II		7 unit	1.117.583.800
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam	5 paket	161.006.000	APBD II		5 paket	185.156.900
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	75 Unit	856.134.000	APBD II		75 Unit	984.554.100
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100 %	693.447.408			100 %	797.464.519
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	541.620.000	APBD II		12 Laporan	622.863.000
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	151.827.408	APBD II		12 Laporan	174.601.519
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi		100 %	961.373.400			100 %	1.105.579.410
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	1 unit	42.040.000	APBD II		1 unit	703.723.410
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	17 Unit	611.933.400	APBD II		17 Unit	48.346.000
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	102 Unit	68.000.000	APBD II		102 Unit	78.200.000
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam	1 Unit	239.400.000	APBD II		15 Unit	275.310.000

Kode	Urusan/Bid.Urusan Pemda dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan		100 %	5.205.073.942			100 %	5.985.835.033
1.03.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Batam	1 Unit Kerja	5.205.073.942	APBD II (BLUD)		1 Unit Kerja	5.985.835.033
1.03.03	PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani air bersih		51,99%	93.731.780.940			54,54%	108.024.648.081
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam		1.400 jiwa	93.731.780.940			1.500 jiwa	108.024.648.081
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Kota Batam	2 dokumen	666.000.000	APBD II		2 dokumen	999.000.000
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kota Batam	5 Liter/Detik	22.150.144.350	APBD II		5 Liter/Detik	25.472.666.003
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kota Batam	2,5 Liter/Detik	39.407.200.000	APBD II		2.5 Liter/Detik	45.318.280.000
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Batam	34 unit	25.864.752.590	APBD II		34 unit	29.744.465.479
1.03.03.2.01.0032	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Batam	150 SR	5.643.684.000	APBD II		150 SR	6.490.236.600
1.03.05	PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi		16,5%	6.075.185.400			17,86%	6.986.463.210
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/ MCK		900 jiwa	6.075.185.400			1.000 jiwa	6.986.463.210
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Kota Batam	160 Rumah Tangga	6.075.185.400	APBD II		160 Rumah Tangga	6.986.463.210
1.03.08	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola		83,33%	129.679.457.486			100%	150.135.522.220
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/revitalisasi dan diawasi)		440 unit	129.679.457.486			440 unit	150.135.522.220
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Kota Batam	8 unit	53.122.433.416	APBD II		8 unit	61.090.798.428
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Kota Batam	2 unit	8.399.791.112	APBD II		2 unit	10.499.738.890
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	100 dokumen	66.515.562.958	APBD II		100 dokumen	76.492.897.402
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Batam	330 dokumen	1.641.670.000	APBD II		330 dokumen	2.052.087.500
1.03.11	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		83,45%	807.957.000			100%	1.009.946.250
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Dibina		83,67%	807.957.000			100%	1.009.946.250
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Kota Batam	100 orang	505.659.000	APBD II		100 orang	632.073.750
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Batam	100 lembaga	302.298.000	APBD II		100 lembaga	377.872.500
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan Data Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota Batam		1 dokumen	0				
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD II			

Kode	Urusan/Bid.Urusan Pemda dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		83,33%	0				
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Kota Batam	100 paket pekerjaan	0	APBD II			
1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Kota Batam	20 Bangunan Konstruksi	0	APBD II			
1.03.12	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang		93,41%	7.908.830.000			100%	9.886.037.500
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan		6 dokumen	6.068.642.520			8 dokumen	7.585.803.150
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Kota Batam	4 dokumen	2.718.671.000	APBD II		6 dokumen	3.398.338.750
1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 dokumen	3.349.971.520	APBD II		2 dokumen	4.187.464.400
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1 dokumen	250.630.000			1 dokumen	313.287.500
1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		1 dokumen	250.630.000			1 dokumen	313.287.500
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan dokumen hasil monev wilayah perencanaan		2 dokumen	943.820.000			2 dokumen	1.179.775.000
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Kota Batam	1 dokumen	845.180.000	APBD II		1 dokumen	1.056.475.000
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Kota Batam	1 dokumen	98.640.000	APBD II		1 dokumen	123.300.000
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		7 dokumen	645.737.480			10 dokumen	807.171.850
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Batam	5 dokumen	267.873.480	APBD II		8 dokumen	334.841.850
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Jumlah Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kota Batam	1 dokumen	61.512.000	APBD II		1 dokumen	76.890.000
1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Kota Batam	1 dokumen	316.352.000	APBD II		1 dokumen	395.440.000

Acuan Format Tabel: Permendagri 86/2017 Tabel T-C.33

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam pada perencanaan tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun rencana kerja beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : **Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang**

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						c a t a n p e n u n g	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Target	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								273.164.019.754					313.802.196.811
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								34.960.808.928					37.759.579.549
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								24.453.507.178					25.676.182.537
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100 %	55 Orang /bul	100 %	24.453.507.178	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	25.676.182.537
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS				Kota Batam									
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK				Kota Batam									
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				Kota Batam									
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK				Kota Batam									
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				Kota Batam									
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS				Kota Batam									
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				Kota Batam									
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK				Kota Batam									
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS				Kota Batam									
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK				Kota Batam									
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				Kota Batam									
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS				Kota Batam									
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK				Kota Batam									
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS				Kota Batam									
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK				Kota Batam									
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				Kota Batam									
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK				Kota Batam									
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS				Kota Batam									
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK				Kota Batam									
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS				Kota Batam									
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK				Kota Batam									
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				Kota Batam									
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK				Kota Batam									
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								349.420.000					401.833.000
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Persentase terpenuhinya penunjang		100 %	10 Orang	100 %	349.420.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang	100 %	401.833.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						c a t a t a n p e n u h i n g	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Target	
			Pendidikan dan Pelatihan	urusan pemerintahan								urusan pemerintahan		
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan				Kota Batam									
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Kota Batam									
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.309.035.000				1.505.390.250	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100 %	1 Paket	100 %	16.128.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	18.547.200
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				Kota Batam									
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100 %	5 Paket	100 %	388.582.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	446.869.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				Kota Batam									
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100 %	2 Paket	100 %	42.375.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	48.731.250
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Kota Batam									
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100 %	12 Dokumen	100 %	118.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	135.700.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan				Kota Batam									
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				Kota Batam									
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100 %	70 Laporan	100 %	743.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	855.542.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Kota Batam									
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Kota Batam									
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.988.952.000				2.287.294.800	
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Persentase terpenuhinya penunjang			6 unit	100 %	971.812.000					1.117.583.800

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						c a t a n p e n u h i n g	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Target	
		penunjang urusan pemerintahan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan	urusan pemerintahan										
1.3.2.02.01.04	Kendaraan Lapangan Roda Dua				Kota Batam									
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100 %	5 paket	100 %	161.006.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	185.156.900
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				Kota Batam									
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor				Kota Batam									
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel				Kota Batam									
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100 %	75 Unit	100 %	856.134.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	984.554.100
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				Kota Batam									
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				Kota Batam									
5.2.02.06.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				Kota Batam									
5.2.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film				Kota Batam									
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer				Kota Batam									
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer				Kota Batam									
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya				Kota Batam									
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan				Kota Batam									
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								693.447.408					797.464.519
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100 %	12 Laporan	100 %	541.620.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	622.863.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon				Kota Batam									
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air				Kota Batam									
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik				Kota Batam									
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				Kota Batam									
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100 %	12 Laporan	100 %	151.827.408	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	174.601.519
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Kota Batam									

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						c a t a n p e n t i n g	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Target	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Kota Batam									
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Kota Batam									
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Kota Batam									
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								961.373.400				1.105.579.410	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100 %	1 unit	100 %	42.040.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	48.346.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				Kota Batam									
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100 %	15 Unit	100 %	611.933.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	703.723.410
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				Kota Batam									
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				Kota Batam									
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				Kota Batam									
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100 %	102 Unit	100 %	68.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	78.200.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				Kota Batam									
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer				Kota Batam									
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya				Kota Batam									
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya				Kota Batam									
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100 %	1 Unit	100 %	239.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	275.310.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan													

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						c a t a n p e n t i n g	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Target	
5.2.03.01.01.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				Kota Batam									
1.03.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								5.205.073.942				5.985.835.033	
1.03.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100 %	1 Unit Kerja	100 %	5.205.073.942	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	5.985.835.033
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD				Kota Batam									
5.2.02.99.99.999	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (Blud)				Kota Batam									
5.2.03.99.99.999	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan (Blud)				Kota Batam									
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								93.731.780.940				108.024.648.081	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								93.731.780.940				108.024.648.081	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Persentase penduduk yang terlayani air bersih		54.54 %	2 Doku men	51.9 9%	666.000.000	Pendapatan Asli Daerah		Persentase penduduk yang terlayani air bersih	54.54 %	999.000.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya													
	1	DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Tumbar Kec. Belakang Padang			Pulau Tumbar Kec. Belakang Padang									
	2	DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Mubut Kec. Galang			Pulau Mubut Kec. Galang									
	3	DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Lingke Kec. Galang			Pulau Lingke Kec. Galang									
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaa n atau SPAM Tematik Tertentu	Persentase penduduk yang terlayani air bersih		54.54 %	5 Liter/ Deti	51.9 9%	22.150.144.350	Pendapatan Asli Daerah		Persentase penduduk yang terlayani air bersih	54.54 %	25.472.666.003
5.2.04.02.06.000	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku													
	1	Optimalisasi/Peningkatan WTP Kasu			WTP Kasu									
	2	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pulau Terong			WTP Pulau Terong									
	3	Optimalisasi/Peningkatan WTP Setokok			WTP Setokok									
	4	Optimalisasi/Peningkatan WTP Mecan			WTP Mecan									
	5	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pemping			WTP Pemping									
	6	Optimalisasi/Peningkatan WTP Ngenang			WTP Ngenang									
	7	Optimalisasi/Peningkatan WTP Pecung			WTP Pecung									
	8	Optimalisasi/Peningkatan WTP Belakang Padang			WTP Belakang Padang									
	9	Optimalisasi/Peningkatan WTP Jaloh			WTP Jaloh									
	10	Optimalisasi/Peningkatan WTP Tiangwangkan			WTP Tiangwangkan									

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						c a t a t a n p e n a h a n g	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026		
			Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Target	
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar														
	1	Pembangunan Pagar Pengaman Reservoir di SPAM Pulau Terong				SPAM Pulau Terong									
	2	Pembangunan Pagar Pengaman Reservoir SPAM Ngenang				SPAM Ngenang									
	3	Pembangunan Pagar Pengaman Reservoir SPAM Kampung Baru Kelurahan Galang Baru Kec. Galang				SPAM Kampung Baru Kelurahan Galang Baru Kec. Galang									
	4	Pembangunan Pagar Pengaman Reservoir SPAM Pulau Air (Lokasi Pulau Mengkada)				SPAM Pulau Air (Lokasi Pulau Mengkada)									
	5	Pembangunan Pagar Pengaman Reservoir SPAM Galang Baru (Lokasi Air Lingka)				SPAM Galang Baru (Lokasi Air Lingka)									
	6	Pembangunan Pagar Pengaman Reservoir SPAM Pulau Air (Lokasi Pulau Air)				SPAM Pulau Air (Lokasi Pulau Air)									
	7	Pembangunan Pagar Pengaman Bangunan Operasional SWRO Pulau Labu				SWRO Pulau Labu									
	8	Pembangunan Pagar WTP Bulang Lintang				WTP Bulang Lintang									
	9	Pembangunan Pagar WTP Seraya				WTP Seraya									
	10	Pembangunan Pagar SWRO Pulau Labu				SWRO Pulau Labu									
1.03.03.2.01.05	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	pasitas atau SPAM tertentu	SPAM yang	Persentase penduduk yang terlayani air bersih		54.54 %	2.5 Liter/ Deti	51.9 9%	39.407.200.000	Pendapatan Asli Daerah	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	54.54 %	45.318.280.000	
5.2.04.02.06.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku														
	Pembangunan SPAM Pulau Cengkui Kel. Pantai Gelam Kec.Bulang														
	Pembangunan SPAM Pulau Panjang Kel. Sijantung Kec.Galang														
	Pembangunan SPAM Tanjung Kubu Kel. Bulang lintang Kec. Bulang														
	Pembangunan SPAM Kel. Sijantung Kec. Galang														
	Pembangunan SPAM Teluk Nipah Kel. Galang Baru Kec. Galang														
	Pembangunan SPAM Batu Putih Pulau Karas Kec. Galang														
	Lanjutan Pembangunan SWRO Belakang Padang														
	Lanjutan Pembangunan WTP Pulau Buluh														
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu		Persentase penduduk yang terlayani air bersih		54.54 %	150 SR	51.9 9%	5.643.684.000	Pendapatan Asli Daerah	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	54.54 %	6.490.236.600	
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya														
	1	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Sembulang (Dapur 6), Kecamatan Galang													
	2	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Cengkui Kel. Pantai Gelam Kec.Bulang													
	3	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Panjang Kel. Sijantung Kec.Galang													

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					c a t a n p e n u n g	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026		
			Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an			Tolak Ukur	Target	
	4	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Tanjung Kubu Kel. Bulang lintang Kec. Bulang												
	5	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Batu Putih Pulau Karas Kec. Galang												
	6	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Sijantung Kec. Galang												
	7	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Teluk Nipah Kel. Galang Baru Kec. Galang												
	8	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang Padang												
	9	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Pemping Kec. Belakang Padang												
	10	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Kasu Kec. Belakang Padang												
	11	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Pecong Kec. Belakang Padang												
	12	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang												
	13	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Tanjung Sari Kec. Belakang Padang												
	14	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Ngenang Kec. Nongsa												
	15	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Kel. Tembesi Kec. Sagulung												
	16	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) SWRO Belakang Padang												
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan		Persentase penduduk yang terlayani air bersih	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Persentase penduduk yang terlayani air bersih		54.54 %	34 Unit	51.9 9%	25.864.750.590	Pendapatan Asli Daerah	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	54.54 %	29.744.465.479
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					(SWRO Belakang Padang)								
	1	Belanja Bahan Kimia (SWRO Belakang Padang)				(SWRO Pulau Labu)								
	2	Belanja Bahan Kimia (SWRO Pulau Labu)				WTP Bulang Lintang								
	3	Belanja Bahan Kimia (WTP Bulang Lintang)				(WTP Kampung Baru - Galang)								
	4	Belanja Bahan Kimia (WTP Kampung Baru - Galang)				(WTP Kel. Galang Baru)								
	5	Belanja Bahan Kimia (WTP Kel. Galang Baru)				(WTP Ngenang Kecamatan Nongsa)								
	6	Belanja Bahan Kimia (WTP Ngenang Kecamatan Nongsa)				(WTP Pulau Air)								
	7	Belanja Bahan Kimia (WTP Pulau Air)				(WTP Pulau Air Gara dan Pulau Bertam Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang)								
	8	Belanja Bahan Kimia (WTP Pulau Air Gara dan Pulau Bertam Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang)				(WTP Pulau Petong)								
	9	Belanja Bahan Kimia (WTP Pulau Petong)				(WTP Pulau Selat Nenek dan Pulau Aweng)								
	10	Belanja Bahan Kimia (WTP Pulau Selat Nenek dan Pulau Aweng)				(WTP Pulau Temoyong Kelurahan Temoyong Kec. Bulang)								
	11	Belanja Bahan Kimia (WTP Pulau Temoyong Kelurahan Temoyong Kec. Bulang)				(WTP Tanjung Banun Kec. Galang)								
	12	Belanja Bahan Kimia (WTP Tanjung Banun Kec. Galang)				(WTP Unit Pemping)								
	13	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pemping)				(WTP Unit Pulau Abang)								
	14	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pulau Abang)												

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					c a t a n p e n t i n g	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026			
			Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Target	
	15	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pulau Air Raja)			(WTP Unit Pulau Air Raja)										
	16	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pulau Geranting)			(WTP Unit Pulau Geranting)										
	17	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pulau Jaloh)			(WTP Unit Pulau Jaloh)										
	18	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pulau Kasu)			(WTP Unit Pulau Kasu)										
	19	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pulau Mecan)			(WTP Unit Pulau Mecan)										
	20	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pulau Pecong)			(WTP Unit Pulau Pecong)										
	21	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pulau Setokok)			(WTP Unit Pulau Setokok)										
	22	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Pulau Terong)			(WTP Unit Pulau Terong)										
	23	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Rempang Cate)			(WTP Unit Rempang Cate)										
	24	Belanja Bahan Kimia (WTP Unit Subang Mas)			(WTP Unit Subang Mas)										
	25	Belanja Bahan Kimia (WTP Belakang Padang)			(WTP Belakang Padang)										
	26	Belanja Bahan Kimia (WTP Sembulang)			(WTP Sembulang)										
	27	Belanja Bahan Kimia (WTP Pulau Seraya Kel. Batu Legong Kec. Bulang)			(WTP Pulau Seraya Kel. Batu Legong Kec. Bulang)										
	28	Belanja Bahan Kimia (WTP Pulau Nguan)			(WTP Pulau Nguan)										
	29	Belanja Bahan Kimia SPAM Pulau Cengkui			SPAM Pulau Cengkui										
	30	Belanja Bahan Kimia SPAM Pulau Panjang			SPAM Pulau Panjang										
	31	Belanja Bahan Kimia SPAM Kubu			SPAM Kubu										
	32	Belanja Bahan Kimia SPAM Batu Putih			SPAM Batu Putih										
	33	Belanja Bahan Kimia SPAM Sijantung			SPAM Sijantung										
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Kota Batam										
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Kota Batam										
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum				Kota Batam										
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Kota Batam										
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Kota Batam										
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Kota Batam										
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								6.075.185.400					6.986.463.210	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								6.075.185.400					6.986.463.210	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Dosmestik (SPALD) Setempat		Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	Jumlah Rumah tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	17,86 %	900 jiwa	16,5 %	6.075.185.400	P ENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17.86 %	1.000 jiwa	6.986.463.210	
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya														
	1	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Sijantung Kec. Galang			Kel. Sijantung Kec. Galang										
	2	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Karas Kec. Galang			Kel. Karas Kec. Galang										

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						c a t a t a n p e n t i n g	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026		
			Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Target	
	3	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Galang Baru Kec. Galang				Kel. Galang Baru Kec. Galang									
	4	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Sembulang Kec. Galang				Kel. Sembulang Kec. Galang									
	5	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Rempang Cate Kec. Galang				Kel. Rempang Cate Kec. Galang									
	6	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Subang Mas Kec. Galang				Kel. Subang Mas Kec. Galang									
	7	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pulau Abang Kec. Galang				Kel. Pulau Abang Kec. Galang									
	8	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Air Raja Kec. Galang				Kel. Air Raja Kec. Galang									
	9	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang				Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang									
	10	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pulau Buluh Kec. Bulang				Kel. Pulau Buluh Kec. Bulang									
	11	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Temoyong Kec. Bulang				Kel. Temoyong Kec. Bulang									
	12	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Batu Legong Kec. Bulang				Kel. Batu Legong Kec. Bulang									
	13	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang				Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang									
	14	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pulau Setokok Kec. Bulang				Kel. Pulau Setokok Kec. Bulang									
	15	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pemping Kec. Belakang Padang				Kel. Pemping Kec. Belakang Padang									
	16	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Kasu Kec. Belakang Padang				Kel. Kasu Kec. Belakang Padang									
	17	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang				Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang									
	18	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Pecong Kec. Belakang Padang				Kel. Pecong Kec. Belakang Padang									
	19	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Tanjung Sari Kec. Belakang Padang				Kel. Tanjung Sari Kec. Belakang Padang									
	20	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang Padang				Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang Padang									
	21	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Tembesi Kec. Sagulung				Kel. Tembesi Kec. Sagulung									
	22	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Ngenang Kec. Nongsa				Kel. Ngenang Kec. Nongsa									
	23	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Pulau Air Kel. Batu Legong Kec. Bulang				Pulau Air Kel. Batu Legong Kec. Bulang									
	24	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Pulau Seraya Kel. Batu Legong Kec. Bulang				Pulau Seraya Kel. Batu Legong Kec. Bulang									
	25	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Pulau Nguan Kel Galang Baru Kec. Galang				Pulau Nguan Kel Galang Baru Kec. Galang									

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						c a t a t a n P e n a h a n g	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026		
			Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Target	
	26	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Temoyong Kec. Bulang				Kel. Temoyong Kec. Bulang									
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG									129.679.457.486					150.135.522.220
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung									129.679.457.486					150.135.522.220
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola		100 %	5 Bangunan Gedung	83,33%	53.122.433.416	P E N D A P A T A N A S L I D A E R A H (PAD)	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	100 %	61.090.798.428	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli														
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor														
	1	Revitalisasi Gedung Kantor Lurah Belian				Batam kota									
	2	Rehabilitasi Gedung Kantor Lurah Batu Besar				Kec Nongsa									
	3	Lanjutan Revitalisasi Gedung Kantor Lurah Tanjung Sengkuang				Tanjung Sengkuang									
	4	Rehabilitasi Kantor Lurah Tiban Lama				Sekupang									
	5	Revitalisasi Kantor Lurah Sagulung Kota				Sagulung									
	6	Revitalisasi Gedung Kantor Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja				Lubuk Baja									
	7	Revitalisasi Kantor Dinas Perikanan Kota Batam				Kota Batam									
	8	Revitalisasi Kantor Lurah Tanjung Buntung				Bengkong									
	9	Revitalisasi Gedung Kantor Lurah Sei- Harapan				Sekupang									
	10	Rehabilitasi Gedung Kantor Lurah Temoyong Kec. Bulang				Bulang									
	11	Revitalisasi Gedung Aula Kantor Lurah Air Raja RT.003 RW.001				Galang									
	12	Revitalisasi Gedung P2TP2A "DANG MERDU " Kota Batam				Kota Batam									
	13	Revitalisasi Gedung Kantor Camat Belakang Padang				Belakang Padang									
	14	Revitalisasi Gedung Kantor Lurah Tiban Indah				Sekupang									
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah														
	1	Lanjutan Revitalisasi Masjid Agung Batam Centre (Tahun Jamak)				Kota Batam									
	2	Revitalisasi Masjid Raya Baiturrahman Kec Sekupang				Kec Sekupang									
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum														
	1	Rehabilitasi Tugu Kampung Tua RW. 09 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung				Sagulung									
	2	Revitalisasi Panggung Dataran Engku Putri Batam Centre				Kota Batam									
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar														
	1	Revitalisasi Pagar Mesjid Agung Batam Center				Kota Batam									
	2	Revitalisasi Pagar Kantor DPRD Kota Batam				Kota Batam									
1.03.08.2.01.0018	Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pelestarian dan Pembongkaran		Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola		100 %	9 Dokumen	83,33%	66.515.562.958	P E N D A P A T A N A S L I D A E R A H (PAD)	Persentase bangunan gedung	100 %	76.492.897.402	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						c a t a n p e n t n g	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Target	
	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		daerah yang dikelola		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				Kota Batam									
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Kota Batam									
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Kota Batam									
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Kota Batam									
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Kota Batam									
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Kota Batam									
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan													
	1	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor MUI Kota Batam			Kota Batam									
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat													
	1	Pembangunan gedung Jamaah Tabligh Kota Batam												
	2	Peningkatan Masjid An-Nahdlah Kota Batam			Batam Centre									
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor													
	1	Pembangunan Gedung Kantor Lurah Tanjung Sengkuang												
	2	Pembangunan Gedung Kantor Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja												
	3	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perpustakaan Kota Batam												
	4	Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka												
	5	Pembangunan Gedung City Hall (Gedung Balai Kota) Kota Batam												
	6	Pembangunan Gedung Aula Kecamatan Sekupang												
	7	Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Sadai												
	8	DED Pembangunan Gedung Kantor Bersama 2												
	9	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam												
	10	Pembangunan Gedung Kantor Lurah Sungai Harapan												
	11	Peningkatan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam												
	12	DED Pembangunan Gedung Kantor Bawaslu Kota Batam												
	13	DED Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Batam												
	14	Pembangunan Gedung Aula Kantor Lurah Tiban Baru												
	15	Pembangunan Gedung Aula Kecamatan Sekupang												
	16	Pembangunan Gedung Aula Kantor Lurah Duriangkang Kel. Duriangkang Kec. Sungai Beduk												
	17	Pembangunan Gedung Aula Kelurahan Pulau Buluh Kecamatan Bulang Kota Batam												
	18	Pembangunan Mushalla Puskesmas DKM Botania 1, Kec. Batam Kota												
	19	Pembangunan Kantor Lurah Sukajadi Kecamatan Batam Kota												
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah													
	1	Lanjutan Pembangunan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Kota Batam			Batu Aji									
	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penguatan Ekonomi Kreatif Masjid Sultan			Batu Aji									

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						c a t a n P e n t a n g	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026		
			Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Target	
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum														
	1	Penataan Dataran Engku Putri Batam Centre				Kota Batam									
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar														
	1	Lanjutan Pembangunan Pagar Dataran Engku Putri Batam Centre				Batam Center									
	2	Pembangunan Pagar Kantor Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang				Bulang									
	3	Pembangunan Pagar RSUD Kota Batam				Batuaji									
	4	Penataan Dataran Engku Putri Batam Centre				BatamCenter									
	5	Pembangunan Pagar Kantor Lurah Bengkong sadai				Bengkong sadai									
	6	Pembangunan Pagar Masjid Sultan				Batuaji									
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman														
	1	Pembangunan Landscape Masjid Sultan				Batuaji									
	2	Pembangunan Landscape Masjid Agung Batam Centre				Kota Batam									
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola		100 %	424 Doku men	83,33%	1.641.670.000	P ENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	100 %	2.052.087.500	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor														
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover														
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer														
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan														
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi														
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli														
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman														
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN														
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN														
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN														
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola		100 %	2 Bangunan Gedu ng	83,33	8.399.791.112	P ENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	100 %	10.499.738.890	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						c a t a n P e n a h u n g	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Target	
	Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Diperiksa Berkala											
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				Kel. Tg. Uncang									
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan				Kel. Tg. Uncang									
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik				Kel. Tg. Uncang									
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air				Kel. Tg. Uncang									
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik				Kel. Tg. Uncang									
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Kel. Tg. Uncang									
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Kel. Tg. Uncang									
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Kel. Tg. Uncang									
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				Kel. Tg. Uncang									
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum													
	1	Pemeliharaan Bukit Clara Batam Centre												
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah													
	1	Pemeliharaan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah												
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								807.957.000					1.009.946.250
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								807.957.000					1.009.946.250
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraa n, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		100 %	300 Orang	83,45%	505.659.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan , dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100 %	632.073.750
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga				Kota Batam									
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Kota Batam									
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan				Kota Batam									
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel				Kota Batam									
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Kota Batam									
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraa n, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		100 %	200 Lembaga	83,45%	302.298.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggara an, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100 %	377.872.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam									

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					c a t a n p e n t i n g	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026			
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Target	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Kota Batam									
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Kota Batam									
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel				Kota Batam									
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Kota Batam									
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								0				325.000.000	
1.03.11.2.02.06	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		100 %	1 Dokumen	83,45%	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100 %	325.000.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam									
5.1.02.02.01.0039	BelanjaJasa Tenaga Informasi dan Teknologi				Kota Batam									
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan				Kota Batam									
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								7.908.830.000				9.886.037.500	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								6.068.642.520				7.585.803.150	
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang		100 %	102 Dokumen	93,41%	2.718.671.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	100 %	3.398.338.750	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Kota Batam									
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus				Kota Batam									
	1	Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kampung Tua Nongsa Pantai			Kota Batam									
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Kota Batam									
1.03.12.2.01.10	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang		100 %	2 Dokumen	93,41%	3.349.971.520	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	100 %	4.187.464.400	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Kota Batam									
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Kota Batam									
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel				Kota Batam									
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang													
	1	Peninjauan Kembal Rencana Detail Tata Ruang			Kota Batam									

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						c a t a n p e n t i n g	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Target	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Kota Batam									
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								250.630.000				313.287.500	
1.03.12.2.02.08	Peningkatan Masyarakat Peran dalam Penataan Ruang	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang		100 %	1 Kegiatan		250.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tersedianya dokumen perencanaan,	100%	313.287.500
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								943.820.000				1.179.775.000	
1.03.12.2.03.03	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggara an penataan ruang	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang		100 %	1 Dokumen	82.42 %	845.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	100 %	1.056.475.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Kota Batam									
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Kota Batam									
1.03.12.2.03.05	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang		100 %	1 Dokumen	82.42 %	98.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	100 %	123.300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Kota Batam									
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel				Kota Batam									
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang				Kota Batam									
	1	Monitoring dan Evaluasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang			Kota Batam									
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Kota Batam									
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								645.737.480				807.171.850	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	93,41%	267.873.480	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	100 %	334.841.850

Kode	Urusan/Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penjelasan	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Kota Batam									
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Kota Batam									
1.03.12.2.04.08	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang		100 %	1 Dokumen	93,41%	61.512.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	100 %	76.890.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Kota Batam									
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Kota Batam									
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				Kota Batam									
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				Kota Batam									
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Kota Batam									
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Kota Batam									
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel				Kota Batam									
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Kota Batam									
1.03.12.2.04.15	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang		100 %	1 Berita Acara	93,41%	316.352.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	100 %	395.440.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Kota Batam									
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				Kota Batam									
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Kota Batam									

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2021–2026 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam tahun 2021 – 2026.

Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 terdiri dari 6 (enam) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub Kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dasar perubahan RKPD Tahun 2025, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2025.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun 2021 – 2026, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja PD menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2025 yang dalam proses penyusunannya harus

- memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam;
2. Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Tahun 2025 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien ;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring ;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Batam, Juli 2024
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kota Batam



AZRIL APRIANSYAH, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730408 200212 1 005



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Kartini I Nomor 29, Sekupang
Telepon/ Faksimile : (0778) 8014354; Fax (0778) 8014170
Email Resmi: discipkatark@batam.go.id, Email : sekretariatcktr@gmail.com,
Website : dcktr.batam.go.id

BATAM



Kode Pos : 29425

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATAM**

Nomor : KPTS. 2136 /DCKTR/XII/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DAN PERUBAHAN,
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM
TAHUN 2025**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Perubahan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dan Perubahan dengan menetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Infonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja dan Perubahan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja dan Perubahan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja dan Perubahan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja dan perubahan Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 01 Desember 2023

Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
Kota Batam



Azril Apriansyah, ST, MT
Pembina TK. I

NIP. 19730408 200212 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang Kota Batam
Nomor : KPTS.2138/DCKTR/XII/2023
Tanggal : 01 Desember 2023

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM**

NO	NAMA JABATAN	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Ketua
3	Kabid. Prasarana Bangunan Gedung	Anggota
4	Kabid. Prasarana Air Bersih dan Air Limbah	Anggota
5	Kabid. Tata Ruang	Anggota
6	Kabid. Bina Konstruksi	Anggota
7	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	Anggota
8	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Anggota
9	Penata Ruang Muda	Anggota
10	Pembina Jasa Kontruksi Ahli Muda	Anggota
11	Kasubbag. Perencanaan dan Program	Anggota
12	Staf Perencanaan dan Program	Anggota

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 01 Desember 2023

Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
Kota Batam



Azril Apriansyah, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730408 200212 1 005